

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin Hoesein, Zainal. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi), (Malang: Setara Press, 2016)

Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Chazawi, Adami. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014)

Suteki, Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018)

Syarief, Mappiase. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Rimdan. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012)

Jurnal

Abdurrahim, La Ode Husen, Nur Faddilah M, Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi, Jurnal JLS Universitas Muslim Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020

Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyanu. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017

Galih Hartanto Putro, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

M. Jordan Pradana, Sofyan Nur, Erwin. Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Neden Rika Puspitasari, Penerapan Pasal 77 KUHP tentang Gugurnya Hak Melakukan Penuntutan dalam Proses Persidangan (Kajian Yuridis Atas Produk Hukum yang Dikeluarkan Hakim Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purbalingga), Jurnal Universitas Jendral Soedirman

Rendi Renaldi Mumbunan. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Jurnal Elektronik Lex Crimen Vol.7 No.10 Tahun 2018 Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi

Internet

<http://eprints.undip.ac.id>

<http://repository.trisakti.ac.id>

<http://repository.unja.ac.id>

<http://repository.unpas.ac.id>

<http://repository.ub.ac.id>

Peraturan Perundang-undangan (Regulasi)

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang Disempurnakan
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor:Per 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Tindak Pidana Umum